

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Topik.

Skripsi ini akan mengupas tentang kebijakan pertahanan di bawah kepemimpinan Vladimir Putin. Pasca berakhirnya Perang Dingin yang terjadi antara Blok Barat dengan Blok Timur, Blok Barat yang diwakili oleh Amerika Serikat berpaham demokrasi sebagai pihak pemenang perang, Blok Timur yang diwakili oleh Uni Soviet yang berpaham Komunis mengalami keruntuhan dan kemunduran karena mengalami kekalahan dalam pertarungan ideologi. Banyak negara-negara di dunia mengalami kekhawatiran dan kecemasan yang luar biasa terhadap Amerika sebagai negara pemenang perang. Hal ini diakibatkan karena Amerika Serikat sebagai pihak yang dominan dan menang dalam peperangan bisa berpotensi menjadi pesaing dan musuh yang nyata bagi negara-negara tersebut. Banyak negara di dunia seperti Tiongkok, India, Pakistan dan Rusia sendiri meningkatkan anggaran pertahanan dan keamanannya. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan, perlindungan dan peningkatan jaminan keamanan bagi warga negara dan wilayah kedaulatan negara tersebut terhadap ancaman dan serangan dari negara lain.

B. Latar Belakang Masalah.

Republik Federasi Rusia pada saat ini berada dalam kondisi perpolitikan baik regional maupun global yang tidak stabil. Sebagai negara yang maju dan besar, Rusia memiliki anggaran yang sangat besar dalam membentuk sebuah

kebijakan pertahanan yang dikondisikan dengan situasi perpolitikan yang ada dan disesuaikan dengan kondisi perekonomian Republik Federasi Rusia. Semakin membaiknya perekonomian Republik Federasi Rusia maka semakin tingginya anggaran pertahanan dan militer yang terserap di anggaran belanja negara Republik Federasi Rusia dan sebaliknya. Anggaran pertahanan dan militer Republik Federasi Rusia menjadi prioritas utama jika dibandingkan dengan anggaran-anggaran yang lain. Anggaran pertahanan dan militer Republik Federasi Rusia menjadi fokus utama dan akan berdampak domino bagi perkembangan industri persenjataan, penciptaan sejumlah alat utama sistem persenjataan (Alutsista) dan modernisasi sejumlah Alutsista.

industri militer dan ekonomi suatu bangsa saling bertautan erat. pernyataan ini yang muncul jika membayangkan Rusia memiliki industri militer yang kuat dan didukung oleh anggaran militer yang tinggi. Dengan adanya dukungan dari anggaran militer yang sangat tinggi Rusia akan menjadi negara yang maju secara ekonomi karena kebijakan ekspor senjata yang dilakukan oleh pemerintah Rusia.

Bagi negara seperti Rusia, kemandirian industri militer dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa masih menjadi cita-cita besar. Sepanjang perjalanan sejarah bangsa Rusia setelah era Komunisme, penguatan dalam sistem pertahanan dan militer negara lebih banyak didukung oleh pasokan sisa-sisa senjata bekas Perang Dunia yang masih sangat layak pakai. Pabrik-pabrik senjata dan gudang-gudang persenjataan Rusia pada masa Perang Dunia masih sangat berguna hingga saat ini. Banyak segala macam jenis persenjataan-

persenjataan yang menjadi warisan Perang Dunia untuk dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan persenjataan Rusia.

Setelah runtuhnya komunisme, Rusia menjadi negara yang terlahir sebagai negara berkembang yang setiap hari harus bergelut dengan isu pemenuhan kebutuhan ekonomi dasar, pendidikan, kesehatan, isu kemandirian dalam industri militer pada saat ini masih kalah menarik. Namun isu dan gagasan untuk mewujudkan kemandirian dalam industri militer tidak bisa diabaikan dan dibelenggu. Kegagalan mewujudkan industri militer akan membawa dampak negatif lain, seperti besarnya anggaran yang harus digunakan untuk membeli peralatan dari negara lain, terhambatnya potensi pertumbuhan ekonomi yang muncul dalam industri militer dalam negeri, serta ketergantungan peralatan militer dari negara lain yang membuat terdeteksinya kekuatan pertahanan dan kemampuan militer yang dimiliki oleh Rusia.

Untuk mewujudkan terciptanya kemandirian dalam industri kemiliteran, dibutuhkan skema dan rencana strategis yang matang. Berbagai potensi, baik dari dalam dan luar negeri, harus dipetakan dengan baik. Pemerintah Rusia juga tidak bisa mengabaikan berbagai persoalan dan sejarah dalam sistem pertahanan dan kemiliteran yang dimiliki sejak keruntuhan era Uni Soviet hingga saat ini. Kemandirian industri kemiliteran ini harus menjadi bagian dari sistem pertahanan dan didukung penuh oleh rencana anggaran belanja militer yang dibuat oleh pemerintahan Rusia yang sistematis dan cermat.

Untuk mendukung kebutuhan pembangunan militer, Rusia telah menaikkan anggaran militer sebesar 25-30%. tahun 2004 anggaran militer Rusia

mencapai \$ 20 miliar USD, tahun 2005 naik menjadi \$ 29 miliar USD, tahun 2006 menjadi \$ 32 miliar USD, pada tahun 2007 anggaran naik kembali menjadi \$ 37 miliar USD, perlu di ingat dan di catat, angka inflansi tahunan Rusia mencapai 9-11 %, Pada tahun 2008 naik menjadi \$ 43 miliar USD (Bank, 2015), pada tahun 2009 turun menjadi \$ 41 miliar USD, pada tahun 2010 turun menjadi \$ 38,01 miliar USD, pada tahun 2011 mengalami kenaikan yang sangat cukup signifikan menjadi \$ 50,67 miliar USD, pada tahun 2012 naik menjadi \$ 55,33 miliar USD, pada tahun 2013 naik menjadi \$ 70 miliar USD (Bank, 2015), pada tahun 2014 \$ 72 miliar USD (SIPRI, 2014), pada tahun 2015 (tahun ini) menjadi \$ 82,7 miliar USD (Jane, 2015).

Dari periode tahun 2004 hingga saat ini tahun 2015 anggaran militer Rusia mengalami fluktuasi. Fluktuatifnya anggaran militer Rusia ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama menyebabkan ialah faktor konflik Rusia dengan negara lain. Konflik mengharuskan sebuah negara untuk menaikkan anggaran militernya. Hal ini dilakukan oleh Republik Federasi Rusia agar dapat mengantisipasi berbagai hal yang berpotensi hilangnya sebuah kedaulatan batas wilayah, jatuhnya korban jiwa dari pihak rakyat Rusia, hilang nya sebuah potensi sumber daya alam yang terkandung didalam perut bumi Rusia dan serta memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap rakyat Rusia, aset-aset negara khususnya di wilayah yang sedang berkonflik dengan Rusia (Doctrine, 2001-2010).

Kebangkitan kekuatan militer Republik Federasi Rusia, di mulai ketika presiden Vladimir Putin menjabat pada tahun 2000. Putin memprioritaskan pada

sektor militer dalam kurun waktu satu dekade terakhir, hingga dewasa ini, Rusia mulai menempuh kebijakan strategis, guna memulihkan kondisi dalam negeri. Rusia masih tetap berusaha untuk mengembalikan pengaruhnya pasca Perang Dunia II, terutama dalam peningkatan kekuatan militernya, yang merupakan sektor vital negara (Fahrudodji, 2005).

Rusia sebagai eks negara Uni Soviet dikenal sebagai negara yang memiliki kemampuan menciptakan, mengembangkan dan memproduksi segala macam jenis dan bentuk persenjataan. Modernisasi militer dan volume transaksi perdagangan senjata mengalami peningkatan yang sangat tajam di bawah kepemimpinan presiden Vladimir Putin. Wilayah Timur Tengah, sebagian besar negara-negara di Asia dan Afrika menjadi pasar yang sangat potensial bagi persenjataan yang berasal dari Rusia.

Pemahaman tentang kebijakan pertahanan dan militer dibangun atas dasar pengalaman Rusia sebagai negara besar yang tidak lagi memiliki kekuatan yang sama dengan Uni Soviet sejak awal tahun 1990-an. Beberapa aspek yang berkaitan dengan sektor pertahanan dan militer harus ikut menjadi bagian program reformasi jika Rusia ingin menciptakan sebuah angkatan perang yang baru, profesional dan sesuai dengan tuntutan zaman. Pemahaman ini tertuang dalam dokumen doktrin militer Republik Federasi Rusia tahun 1993, 2000 dan 2010 (Doctrine, 2001-2010). Putin menerjemahkan pemahaman konsep teoritis tersebut dengan merancang program reformasi militer yang bertujuan untuk menghasilkan angkatan bersenjata dan produk senjata yang efektif, efisien, mampu bertempur dalam konflik skala kecil, didukung dengan teknologi persenjataan yang mutakhir

dan dapat menghasilkan keuntungan berupa pemasukan dari sebuah proses ekspor senjata yang berasal dari Rusia.

Uraian di atas merupakan permasalahan-permasalahan Rusia Saat ini yang seharusnya mendapatkan perhatian yang sangat serius dari pemerintahan Putin. mengingat posisi Rusia sebagai pewaris Uni Soviet yang pernah berjaya dan menjadi ikon kekuatan dunia di Blok Timur.

C. Rumusan masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, bisa diajukan bahwa pokok permasalahan sebagai berikut :

Mengapa Rusia meningkatkan anggaran pertahanan di bawah kepemimpinan Vladimir Putin ?

D. Landasan Teori.

Realisme merupakan perspektif yang pertama kali muncul dan telah menjadi teori politik dunia yang dominan sejak awal terbentuknya ilmu hubungan internasional. Ide dan asumsi dasar kaum realisme adalah: (1) pandangan pesimis atas sifat manusia; (2) keyakinan bahwa hubungan internasional pada dasarnya konfliktual dan bahwa konflik internasional pada akhirnya diselesaikan melalui perang; (3) menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara; (4) skeptisme dasar bahwa terdapat kemajuan dalam politik internasional seperti yang terjadi dalam kehidupan politik domestik (Sorensen, 2009). Dalam pemikiran kaum realisme, manusia dicirikan sebagai makhluk yang

selalu cemas akan keselamatan dirinya. Mereka ingin berada dalam kursi pengendali dan juga mereka akan terus menerus berjuang untuk mendapatkan 'yang terkuat' dalam hubungannya dengan yang lain termasuk hubungan internasional dengan negara lain. Politik adalah perjuangan memperoleh kekuasaan atas manusia, dan apa pun tujuan akhirnya, kekuasaan adalah tujuan terpentingnya dan cara-cara memperoleh, memelihara, dan menunujukan kekuasaan menentukan teknik tindakan politik.

Teori dan konsep yang dapat mendukung penjelasan diatas yakni kepentingan nasional dan balance of power.

Kepentingan nasional.

Kepentingan nasional menurut Hans J. Morgenthau, dapat didefinisikan sebagai usaha negara untuk mengejar *power*, di mana *power* adalah segala sesuatu yang bisa mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Yang mana makna yang tersirat dalam konsep kepentingan nasional tersebut adalah kelangsungan hidup (*survival*). Menurut pandangan Morgenthau, kepentingan nasional merupakan syarat minimum suatu negara untuk melindungi identitas fisiknya, yakni negara harus bisa mempertahankan integritas teritorialnya, kedua, untuk melindungi identitas politiknya, yakni negara harus bisa mempertahankan rezim ekonomi-politiknya, dan yang ketiga yaitu untuk melindungi identitas kulturalnya, yang mana negara harus bisa memelihara norma-norma etnis, religius, linguistik dan sejarahnya. Morgenthau mengatakan,

bahwa dari tujuan-tujuan yang harus dicapai negara tersebut, pemimpin negara bisa memunculkan politik-politik yang bersifat kooperatif dan konflikual yang spesifik, seperti: perlombaan senjata, *balance of power*, bantuan luar negeri, aliansi-aliansi, subversi, “perang” propaganda dan “perang” ekonomi (Coulombis, 1990). Kepentingan nasional bersumber dari pemakaian sintesis nilai yang digeneralisasikan pada keseluruhan situasi di mana negara mengambil tempat dalam politik dunia. Kepentingan nasional memberikan ukuran konsistensi yang diperlukan dalam kebijakan nasional. Suatu negara yang sadar mempertahankan kepentingan nasionalnya dalam situasi yang berubah cepat, akan lebih cenderung untuk mempertahankan keseimbangan dan melanjutkan usaha ke arah tujuannya daripada mengubah kepentingannya dalam menyesuaikan diri dengan situasi baru. Kepentingan nasional merupakan tindakan negara dalam politik internasional (Nasution, 1991).

Kepentingan nasional suatu negara timbul akibat terbatasnya sumber daya nasional, atau kekuatan nasional, sehingga negara-bangsa yang bersangkutan merasa perlu untuk mencari pemenuhan kepentingan nasional keluar dari batas-batas negaranya (Warsito, 1998). Kepentingan nasional selalu berkaitan erat dengan politik luar negeri.

Hans J. Morgenthau menyatakan bahwa :

“Esensi dari politik luar negeri ialah kepentingan nasional”

Maksudnya adalah bahwa politik luar negeri suatu negara didasarkan kepada kepentingan politik domestik, atau bahwa politik luar negeri merupakan cerminan dari politik domestik suatu negara.

Kepentingan nasional juga diartikan sebagai :

Kelangsungan hidup (Survive) yang meliputi kemampuan untuk melindungi identitas fisik, mempertahankan rezim ekonomi politiknya dan memelihara identitas kultur nya (Morgenthau, 2010).

Balance of Power

Konsep Balance of Power dalam Hubungan Internasional dapat dijelaskan dalam beberapa bentuk terminologi perimbangan kekuatan, artinya masing-masing negara memiliki kekuatan yang seimbang dalam situasi equilibrium atau salah satu negara dalam konteks ini memiliki kekuatan sementara yang lebih besar dibandingkan dengan negara lainnya (Sorensen, 2009).

Balance of Power atau perimbangan kekuasaan oleh para ahli sejarah, diplomat dan mahasiswa Hubungan Internasional disepakati sebagai satu satunya cara untuk memelihara perdamaian dunia. Perimbangan kekuatan sebenarnya tidak hanya berbicara tentang kemampuan militer dan pangkalan militer, tetapi juga keseluruhan struktur kekuasaan dan pengaruh yang mengatur hubungan antarnegara dengan kata lain perimbangan kekuatan mencakup semua kemampuan politik negara negara baik bersifat paksaan atau bujukan yang mempertahankan perimbangan konflik tanpa perang (Jones, 1993).

Perimbangan kekuatan ini mengalami proses yang kemudian menyebabkan munculnya beberapa macam atau kategori. pertama, perimbangan kekuatan bipolar ketat yang berlangsung pada abad ke-19 melibatkan hubungan politik yang berakhir dengan pecahnya Perang Dunia I. Kedua, perimbangan kekuasaan bipolar longgar pada pertengahan tahun 1950-an perubahan mendasar terjadi dalam sistem internasional di mana dua sistem negara adikuasa mulai mengendur, dengan munculnya konflik-konflik internal dan rasa tidak percaya pada masing masing blok. Ketiga, perimbangan kekuatan multipolar awal pada awal tahun 1970-an. Keempat, yaitu perimbangan kekuatan yang berlangsung hingga saat ini. Perimbangan kekuatan yang tengah berlangsung pada saat ini adalah keterlanjutan dari perimbangan kekuatan multipolar awal yang berlangsung antara tahun 1970-an, di mana ada banyak pihak yang terlibat melakukan perimbangan kekuatan (Sorensen, 2009).

1. Definisi Konseptual Dan Operasional

Kepentingan Nasional

Definisi Konseptual

Kepentingan Nasional ialah syarat minimum suatu negara untuk melindungi identitas fisiknya, yakni negara harus bisa mempertahankan integritas teritorialnya. Kedua, untuk melindungi identitas politiknya, yakni negara harus bisa mempertahankan rezim ekonomi-politiknya. Ketiga yaitu untuk melindungi identitas kulturalnya, yang mana negara harus bisa memelihara norma-norma etnis, religius, linguistik dan sejarahnya (Morgenthau, 2010).

Definisi Operasional

Kepentingan Nasional : Melindungi identitas Politiknya, melindungi rezim ekonomi politiknya dari segala macam ancaman, melindungi identitas kultural berupa norma etnis, religius, linguistik dan sejarahnya, mendapatkan keamanan baik dari dalam maupun luar negeri dan memperoleh kesejahteraan (Morgenthau, 2010).

Balance of Power

Definisi Konseptual

Balance of Power ialah suatu keadaan di mana masing-masing negara memiliki kekuatan yang seimbang dalam situasi equilibrium atau salah satu negara dalam konteks ini memiliki kekuatan sementara yang lebih besar dibandingkan dengan negara lainnya (Jones, 1993).

Definisi Operasional.

Balance of Power : Perimbangan dalam konstelasi politik, ekonomi, militer, jumlah persenjataan yang dimiliki, kemunculan aktor politik yang memiliki pengaruh yang sangat besar, adanya distribusi status kekuasaan, status kekayaan dan kapabilitas militer yang berbeda beda disuatu wilayah, adanya persaingan konflik yang berkepanjangan namun dapat dikendalikan oleh para aktor aktor politik yang memiliki sebuah sistem yang berbeda, adanya sebuah paham bahwa distribusi kekuatan dapat menguntungkan aktor aktor politik (Sorensen, 2009)

2. Implementasi Teori.

Republik Federasi Rusia dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2015 menentukan dan menetapkan kebijakan pertahanannya sesuai dengan kondisi perpolitikan dan perekonomian dalam skala nasional maupun global. Di tahun 1999 menjadi awal presiden Vladimir Putin memimpin Federasi Rusia. Fokus utama kebijakan pertahanan di awal kepemimpinan Vladimir Putin pada meluasnya hegemoni Amerika Serikat di Eropa Timur dengan hadirnya NATO dan menghidupkan kembali militer Republik Federasi Rusia.

Dalam pembuatan anggaran pertahanan dan militer harus dibuat secara cermat, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan nasional Republik Federasi Rusia. Pembuatan anggaran pertahanan dan militer akan berdampak domino yaitu banyaknya beberapa produk-produk persenjataan yang dihasilkan, banyaknya sejumlah produk persenjataan yang telah dimodernisasi dan kebijakan ekspor persenjataan guna memenuhi kebutuhann persenjataan bagi negara-negara konsumen persenjataan.

Kepentingan nasional dari pembuatan anggaran pertahanan Rusia yaitu Rusia dapat memberikan perlindungan terhadap keamanan aset, identitas individu, identitas politik, identitas sosial yang berada baik di dalam negeri dan luar negeri. Mendapatkan devisa dari Ekspor persenjataan Global dan Peningkatan Posisi tawar Rusia di dunia internasional.

Meluasnya hegemoni Amerika Serikat di wilayah Eropa Timur dengan hadirnya NATO dari awal kepemimpinan Vladimir Putin sampai saat ini dinilai

merupakan sebuah ancaman yang sangat nyata bagi perluasan hegemoni Republik Federasi Rusia terhadap negara-negara yang dahulu tergabung kedalam Uni Soviet. Bentuk ancaman tersebut yaitu adanya sistem penangkis rudal yang di tempatkan di wilayah Polandia dan Republik Ceko. Bagi Amerika Serikat penempatan sistem penangkis rudal tersebut bertujuan untuk melindungi negara-negara sekutu Amerika Serikat dari serangan rudal yang berasal dari negara Iran dan Korea Utara. Tapi menurut Republik Federasi Rusia sendiri penempatan sistem penangkis rudal tersebut bisa berpotensi sebagai serangan pertama kepada Rusia jika perang dimulai. Hal ini sangat membahayakan kepentingan nasional Republik Federasi Rusia.

Pada periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 Republik Federasi Rusia menjadi negara pengeksport persenjataan di dunia. Sejumlah produk persenjataan yang dihasilkan merupakan hasil dari kebijakan pertahanan dan militer Republik Federasi Rusia. Vladimir Putin menganggap bahwa perkembangan industri persenjataan menjadi modal yang sangat penting untuk menjadikan posisi Republik Federasi Rusia sebagai *balancer* di tengah hegemoni Amerika Serikat sebagai negara nomer satu pengeksport persenjataan global.

Di dunia pada saat ini persebaran persenjataan global secara umum dikuasai oleh produk persenjataan yang berasal dari industri persenjataan Republik Federasi Rusia dan industri persenjataan dari Amerika Serikat. Terjadinya persaingan antara Amerika Serikat dengan Republik Federasi Rusia dalam merebut pasar senjata global, menjadikan Republik Rusia sebagai Balancer terhadap Amerika Serikat

E. Hipotesa.

Presiden Vladimir Putin melakukan kebijakan peningkatan anggaran militer karena beberapa alasan berikut:

Meningkatkan kemampuan Rusia untuk menjamin keamanan di luar negaranya

Untuk menjalankan peran sebagai *balancer* di tengah penetrasi Amerika Serikat di Eropa Timur.

F. Tujuan Penelitian.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara objektif tentang sebuah permasalahan tertentu. penulisan skripsi ini bertujuan antara lain untuk:

Memberikan sebuah gambaran dan penjelasan tentang kepentingan rusia mengenai kebijakan pertahanan di bawah kepemimpinan Vladimir Putin dari tahun 1999 sampai 2015.

G. Jangkauan Penelitian.

Jangkauan penelitian ini menggunakan jangka waktu selama kepemimpinan Vladimir Putin dari awal kepemimpinannya di tahun 2000 sampai tahun 2015 yang di mana di tahun ini terjadi ketidakstabilan politik global.

H. Metode Penelitian.

Teknik yang digunakan oleh penulis adalah dengan studi kepustakaan yang bersumber dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yang

akan dilakukan baik itu berupa buku, jurnal ilmiah, surat kabar dan majalah. Selain itu pencarian data juga dilakukan dengan melakukan pencarian di berbagai sumber data internet (Suharsono, 1996).

I. Teknik Penelitian.

a) Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yang bersifat deskriptif kuantitatif maupun kualitatif yaitu menggambarkan tentang kebijakan Vladimir Putin untuk meningkatkan anggaran militer dan pertahanan. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang serta perilaku yang diamati, sedangkan penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk angka. Penulis perlu menggabungkan dua jenis penelitian ini karena diperlukannya data data kuantitatif untuk menunjang dalam mendiskripsikan permasalahan yang ada, dan sebagai bukti kuat dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

b) Data dan Jenis.

Data adalah segala keterangan atau informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan penelitian, data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tersusun dalam bentuk bentuk tidak langsung seperti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di teliti.

J. Rencana Sistematika Penelitian.

Secara keseluruhan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dan disusun secara sistematis yaitu:

Bab I : Bab ini berisi alasan pemilihan topik, latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teori, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian, teknik penelitian, rencana sistematika penelitian.

Bab II : Bab ini berisi tentang profil kebijakan pertahanan Rusia dari masa ke masa yaitu tentang dasar kebijakan pertahanan, tujuan kebijakan pertahanan, profil kekuatan militer rusia, kebijakan pertahanan Vladimir Putin, keuntungan dan kerugian Republik Federasi Rusia dalam menentukan kebijakan pertahanan

Bab III : Bab ini berisi tentang kemampuan rusia melalui untuk menjamin keamanan nasional di negara nya yaitu dengan peningkatan anggaran pertahanan, peningkatan persenjataan, peningkatan misil, peningkatan misil nuklir, pemanfaatan angkasa luar untuk militer, memperkuat demokrasi Rusia, menasionalisasi Aset, peran kelompok Silovinki.

Bab IV : Bab ini berisi tentang bagaimana cara Rusia sebagai *Balancer* terhadap Amerika Serikat yaitu mempertahankan Rusia sebagai negara pengekspor Senjata, meningkatkan posisi tawar diplomatik Rusia, sikap aktif Rusia dalam tatanan politik internasional, membendung pengaruh NATO, penolakan rusia terhadap proyek militer Amerika Serikat di luar angkasa, eksplorasi ruang angkasa, kerjasama Rusia dengan negara lain.

Bab V : Bab ini berisi kesimpulan.

Bab VI : Daftar Pustaka

